



Mengungkap Faktor-Faktor Penentu Optimalisasi PBB-P2 di Kabupaten Sumbawa: Pendekatan Kualitatif Dan Kebijakan Fiskal

Maharani Putri Damayanti¹, D. Tialurra Della Nabila²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia

*Corresponding author email: ranimhr698@gmail.com

Article Info

Article history:

Received April 15, 2025

Approved May 20, 2025

Keywords:

Land and Building Tax,
PBB-P2, Taxpayer
Compliance, Fiscal
Policy, Sumbawa
Regency.

ABSTRACT

This study aims to identify factors that influence the optimization of land building tax (PBB-P2) revenue in Sumbawa Regency, as well as evaluate the effectiveness of fiscal policies implemented by the local government. Using a descriptive qualitative approach, this study examines the dynamics of taxpayer compliance, fiscal policy, and efforts that have been made to increase PBB-P2 revenue. The results show that the low level of taxpayer awareness and compliance, weak policy socialization, and geographical challenges are the main obstacles in optimizing PBB-P2 revenue. On the other hand, efforts to digitize tax services, update data, strengthen coordination between agencies, and plan to provide tax relief are positive steps that have been taken by the local government. This Study recommends the need for fiscal policy innovation based on local needs, increasing tax education to the community, and strengthening the capacity of tax officials to encourage the optimalization of PBB-P2 revenue in a sustainable manner, so that it can support more independent regional development.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sumbawa, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah daerah. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkaji dinamika kepatuhan wajib pajak, kebijakan fiskal, serta upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, lemahnya sosialisasi kebijakan, serta tantangan geografis menjadi hambatan utama dalam optimalisasi penerimaan PBB-P2. Di sisi lain, upaya digitalisasi pelayanan pajak, pemutakhiran data, penguatan koordinasi antarinstansi, serta rencana pemberian keringanan pajak merupakan langkah positif yang telah diambil pemerintah daerah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya inovasi kebijakan fiskal berbasis kebutuhan lokal, peningkatan edukasi perpajakan kepada masyarakat, serta penguatan kapasitas petugas pajak untuk mendorong optimalisasi penerimaan PBB-P2 secara berkelanjutan, sehingga dapat mendukung pembangunan daerah yang lebih mandiri.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Damayanti, M. P., & Nabila, D. T. D. (2025). Mengungkap Faktor-Faktor Penentu Optimalisasi PBB-P2 di Kabupaten Sumbawa: Pendekatan Kualitatif dan Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(2), 650–657. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i2.3774>

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu instrumen pajak yang penting bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). PBB menjadi bentuk kontribusi masyarakat yang memanfaatkan tanah dan bangunan untuk berbagai kepentingan ekonomi dan sosial. Menurut (Mardiasmo, 2018) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu pajak yang dikenakan pada bumi dan/ atau bangunan yang dikuasai oleh badan atau perseorangan, kecuali daerah yang dimanfaatkan untuk perhutanan, pertanian serta penambangan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu instrumen pajak yang penting bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). PBB menjadi bentuk kontribusi masyarakat yang memanfaatkan tanah dan bangunan untuk berbagai kepentingan ekonomi dan sosial. Menurut (Mardiasmo, 2018) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu pajak yang dikenakan pada bumi dan/ atau bangunan yang dikuasai oleh badan atau perseorangan, kecuali daerah yang dimanfaatkan untuk perhutanan, pertanian serta penambangan.

Pajak ini diatur secara khusus melalui peraturan pemerintah dan pendapatan dari PBB-P2 digunakan untuk mendukung pembangunan daerah, seperti peningkatan infrastruktur, layanan publik, serta program-program sosial ekonomi lainnya. Dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, peran PBB-P2 semakin signifikan karena daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam mengelola sumber keuangannya demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Namun, di banyak daerah termasuk Kabupaten Sumbawa, optimalisasi penerimaan PBB-P2 masih menjadi tantangan yang besar. Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sumbawa menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya, sering kali tidak mencapai target yang ditetapkan. Padahal, Kabupaten Sumbawa memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2, mengingat laju perkembangan pembangunan, sektor properti yang terus tumbuh, serta peningkatan penggunaan tanah untuk kegiatan komersial. Kendala dalam penerimaan PBB-P2 tidak hanya terjadi pada sisi teknis, seperti sistem administrasi dan pengelolaan data wajib pajak, tetapi juga mencakup aspek kepatuhan wajib pajak, kurangnya sosialisasi kebijakan, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan penagihan.

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya PBB-P2 sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam pembangunan masih relatif rendah. Andreas (2015) dalam (Saadah, 2021) mengatakan kesadaran pajak merupakan keadaan wajib pajak menyadari, mengerti, menghitung, membayar dan menjalankan tanggung jawab pajak secara sukarela. Banyak wajib pajak yang tidak memahami kewajiban mereka atau merasa terbebani dengan jumlah PBB-P2 yang harus dibayarkan, sehingga menunda atau bahkan menghindari pembayaran pajak. Kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai tata cara pembayaran, manfaat pajak, serta sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh turut memperburuk situasi. Di sisi lain, pemerintah daerah sering kali menghadapi kendala teknis dalam penagihan dan pelaksanaan sanksi bagi penunggak pajak, yang pada akhirnya berujung pada rendahnya tingkat realisasi penerimaan PBB-P2.

Dalam konteks tersebut, penelitian mengenai faktor-faktor penentu optimalisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sumbawa menjadi sangat relevan. Meskipun telah banyak penelitian tentang PBB-P2 di berbagai daerah, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang faktor-faktor spesifik yang memengaruhi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sumbawa, termasuk aspek-aspek kebijakan fiskal lokal dan karakteristik unik dari masyarakat setempat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai faktor-faktor yang menghambat optimalisasi penerimaan PBB-P2 dan bagaimana kebijakan yang tepat

dapat diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mengatasi tantangan tersebut, sehingga kontribusi PBB-P2 terhadap pembangunan daerah dapat dimaksimalkan.

Urgensi penelitian ini juga terletak pada pentingnya meningkatkan kapasitas pendapatan asli daerah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan fiskal di tingkat pusat menyebabkan daerah-daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Sumbawa, harus lebih mandiri dalam mengelola sumber-sumber pendapatan mereka. Oleh karena itu, optimalisasi PBB-P2 menjadi semakin penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Meskipun sudah banyak penelitian tentang optimalisasi penerimaan PBB-P2 di Indonesia, penelitian yang mengkaji faktor-faktor spesifik yang memengaruhi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sumbawa masih terbatas. Banyak studi sebelumnya hanya berfokus pada aspek teknis dan administratif, seperti mekanisme penetapan tarif pajak atau efisiensi sistem pembayaran. Sedangkan aspek perilaku wajib pajak, kebijakan fiskal daerah, serta sosialisasi dan penegakan hukum belum banyak diulas secara mendalam, terutama dalam konteks Kabupaten Sumbawa.

Selain itu, penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif yang hanya menganalisis data statistik penerimaan PBB-P2, tanpa mengeksplorasi secara mendalam faktor-faktor yang bersifat kualitatif, seperti efektivitas kebijakan, dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali lebih dalam mengenai dinamika dan interaksi antara wajib pajak, pemerintah daerah, serta kebijakan pajak yang diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang permasalahan yang ada dan solusi yang dapat diterapkan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam dan komprehensif mengenai fenomena yang berkaitan dengan optimalisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sumbawa. Menurut Moleong (2005: 6) dalam (Nasution, 2023) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana subjek penelitian (wajib pajak, petugas pajak, dan pejabat pemerintah) merasakan, memahami, dan menginterpretasikan faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sumbawa.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dianggap memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian, antara lain Petugas Pajak dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sumbawa. Data sekunder didapatkan dari dokumen resmi seperti Dokumen Kebijakan dan Peraturan Pajak, Laporan Penerimaan PBB terkait realisasi penerimaan PBB selama beberapa tahun terakhir serta target dan capaian penerimaannya, literatur dan studi yang relevan mengenai PBB-P2, baik di Indonesia secara umum maupun di daerah lain yang memiliki kesamaan dengan Kabupaten Sumbawa.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Bogdan (dalam Sugiyono, 2018: 334) menyebutkan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga lebih mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sumbawa. Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan reduksi data, yaitu penyederhanaan data mentah melalui proses pengkodean. Setelah itu, data yang telah dikategorikan akan disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

Setelah data dikategorisasi, dilakukan interpretasi terhadap informasi yang diperoleh, dengan tujuan memahami konteks sosial, kebijakan fiskal, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2. Hasil analisis ini kemudian akan digunakan untuk menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi yang relevan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sumbawa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Target dan Realisasi PBB-P2 Kabupaten Sumbawa

Penelitian mengkaji faktor-faktor penentu optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sumbawa melalui analisis mendalam terhadap berbagai hambatan dan peluang yang dihadapi. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi salah satu instrumen utama pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1. Perkembangan Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Sumbawa Pada Tahun 2019-2024

Tahun	Target	Realisasi	Persentase tercapai (%)
2019	6,650,000,000.00	5,724,113,572.48	86.08%
2020	5,000,000,000.00	5,091,612,147.00	101.83%
2021	6,700,000,000.00	5,544,516,982.83	82.75%
2022	6,700,000,000.00	5,191,652,805.00	77.49%
2023	6,700,000,000.00	5,003,566,106.54	74.68%
2024	6.700.000.000,00	3.906.166.959,00	58,30%

Sumber: Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa T.A. 2019-2024, Data diolah 2025

Tantangan signifikan terlihat dari tabel Perkembangan Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Sumbawa pada periode 2019-2024 yang menunjukkan fluktuasi dan tren menurun. Pada 2024, persentase pencapaian target hanya sebesar 58,30%, terendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menandakan adanya masalah struktural dan manajerial dalam pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Sumbawa.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sumbawa

1. Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya PBB-P2 untuk pembangunan daerah masih rendah. Wajib pajak sering kali tidak memahami fungsi PBB-P2 sebagai instrumen pembangunan, seperti penyediaan infrastruktur atau peningkatan layanan publik. Selain itu, wajib pajak merasa terbebani oleh nilai pajak yang dinilai tidak sebanding dengan manfaat yang mereka rasakan. Kurangnya kegiatan sosialisasi oleh pemerintah daerah turut memperburuk situasi ini. Banyak wajib pajak tidak memiliki akses informasi yang memadai tentang prosedur pembayaran, sanksi keterlambatan, atau manfaat kontribusi mereka terhadap PAD.

2. Kebijakan Fiskal Pemerintah Daerah

Kebijakan fiskal yang diterapkan masih terfokus pada aspek administratif dan kurang memperhatikan pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Contohnya, kebijakan pemberian insentif atau penghapusan denda pajak yang sukses diterapkan di daerah lain masih jarang diimplementasikan di Kabupaten Sumbawa.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa

- a. Melakukan digitalisasi dalam proses pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangun Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Contohnya seperti Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran secara online di manapun dan kapanpun serta Wajib Pajak bisa melakukan pengecekan dan melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara mandiri melalui portlet yang telah disediakan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa.
- b. Melakukan penagihan secara rutin terhadap seluruh kecamatan yang ada bersama dengan perangkat desa yang ada serta membuat jadwal penagihan yang efektif agar masyarakat merasakan hadirnya pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa terhadap pelayanan masyarakat.
- c. Mengoptimalkan pemutakhiran data secara berkala agar database selalu ter-update.
- d. Berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam melaksanakan harmonisasi terkait dengan Zona Nilai Tanah agar dalam penilaian NJOP tepat dan maksimal dengan melihat keadaan masyarakat daerah.
- e. Membentuk Tim Optimalisasi dalam pemeriksaan dalam meningkatkan pengawasan dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Kebijakan fiskal yang diterapkan dalam pengelolaan PBB-P2 dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Kewenangan dalam pemungutan pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat menjadi alasan utama Perintah Daerah diberikan kemandirian dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan fiskalnya. Dengan begitu Pemerintah Daerah dituntut untuk berupaya lebih keras mencari potensi pendapatan PAD dari sector PBB-P2 pada wilayah kewenangannya. Kebijakan fiskal atau strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari

sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu:

- a. Sosialisasi dalam meningkatkan pemungutan PBB-P2 yang optimal.
- b. Merevisi dan senantiasa melakukan pemutakhiran terhadap basis data
- c. Merevitalisasi pemungutan
- d. Meningkatkan pengawasan pajak.
- e. Meningkatkan tingkat efisiensi administrasi
- f. Melakukan koordinasi dengan Lembaga Pemerintah dan instansi pemerintah lainnya dalam pengoptimalan penerimaan PBB-P2.
- g. Memberikan insentif pemungutan kepada bidang maupun perangkat desa yang melakukan pemungutan PBB-P2.
- h. Meningkatkan SDM petugas dalam melakukan penilaian pajak melalui bimtek maupun pelatihan sertifikasi yang sesuai.

Penerimaan dari sektor pajak merupakan anggaran yang sangat penting sebagai instrument pembiayaan operasional dalam rangka pelayanan masyarakat. sayangnya, dalam implementasi pemungutan Pajak Daerah terdapat banyak tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat atau Wajib Pajak akan pemenuhan kewajiban perpajakannya dan khususnya dalam kasus Kabupaten Sumbawa terdapat tantangan geografis yang merupakan daerah pegunungan dan masih terdapat daerah yang terisolir serta tidak terdapat unit bank daerah untuk menyetorkan hasil pemungutan pajaknya.

Kebijakan masa depan yang direncanakan untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 Kabupaten Sumbawa

Pemerintah Daerah Kabupetn Sumbawa menyadari akan kemampuan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah yang telah menjadi beban tersendiri bagi sebagian Wajib Pajak. Kebijakan yang mungkin dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupetn Sumbawa untuk masa yang akan datang yaitu memberikan kebijakan berupa pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok pajak dan/atau sanksi pajak serta fasilitas angsuran pembayaran pajak terutang yang bertujuan untuk membantu mengurangi beban Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dan juga untuk menjaga daya beli masyarakat, sehingga tujuan dalam mengoptimalkan dan menghimpun penerimaan pajak daerah khususnya PBB-P2 dapat terealisasi secara optimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sumbawa masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama yang menghambat penerimaan pajak, diperburuk oleh kurangnya sosialisasi yang efektif dan keterbatasan dalam pelayanan publik. Kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah daerah, meskipun sudah berupaya melakukan digitalisasi dan pemutakhiran data, masih perlu disempurnakan dengan pendekatan yang lebih responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, faktor geografis Kabupaten Sumbawa yang cukup kompleks turut menjadi kendala dalam proses pemungutan pajak secara efektif. Upaya yang telah dilakukan seperti peningkatan pelayanan berbasis digital, penguatan koordinasi antarinstitusi, serta rencana kebijakan masa depan berupa pemberian keringanan dan

fasilitas angsuran pajak menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2. Ke depan, untuk mencapai optimalisasi yang lebih maksimal, dibutuhkan penguatan edukasi perpajakan kepada masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia petugas pajak, serta inovasi kebijakan fiskal yang adaptif dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa dapat terus meningkat guna mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, I., Natsir, N., & Salam, H. B. (2022). The Effectiveness Of Collection Of Land And Building Tax In Regional Revenue Agency (Bapenda) Makassar City. *International Journal of Economics and Management Research*, 1(3), 115-121.
- Berry, C. R. (2021). Reassessing the property tax. Available at SSRN 3800536.
- Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. (2020). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 290-298.
- Djatnicka, E., Wulandari, D. S., & Nisa, K. (2024). Analysis of the Effectiveness and Contribution of Land and Building Taxes to the Original Regional Income of Bekasi Regency. *Indonesian Journal of Economic & Management Sciences*, 2(1), 69-78.
- Hambani, S., & Lestari, A. (2020). Pengaruh Penyuluhan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akunida*, 6(1), 1-12.
- Hasmi, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(9), 1165-1172.
- Kalsum, A. U., Djaing, H., & Rusdi, M. (2024). Dinamika Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan: Studi Kasus Kabupaten Majene. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 33-47.
- Kolatung, J. F. (2021). Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2).
- Lamangida, T., & Puluhulawa, M. (2021). Strategies in Collecting Land and Building Taxes in Tridarma Village, Pulubala District, Gorontalo Regency. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 2(12), 11-14.
- Larasasti, D., & Lutfi, A. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Provinsi DKI Jakarta. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 637-653.
- Lastu, N. P., & Nurmalasari, W. I. (2023). THE APPLICATION OF NON- TAXABLE SALES VALUE OF TAX OBJECT IN THE CALCULATION OF LAND AND BUILDING TAX. *Jurnal Bisnis Terapan*, 7(1), 105-114.
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *PERPAJAKAN–Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175-184.

- Nainggolan, E. P. (2022). Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 1-6.
- Nasution, A. F. (2023). Metode penelitian kualitatif.
- Nurtanzila, L., & Kumorotomo, W. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PBB P2 di Kota Yogyakarta Pasca Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan PBB P2 Oleh Pusat Kepada Daerah. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(2), 155-168.
- Oktavianti, T., Girsang, R. N., & Marthika, L. D. (2021). PENGARUH SANKSI PAJAK, SOSIALISASI, TINGKAT PENDAPATAN, PELAYANAN JASA, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (Studi Kasus di Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2).
- Pajak, K. W. (2021). Pengaruh Tingkat Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro)* Laila Ulfaatus Saadah.
- Ramadhanti, I., Suharno, S., & Widarno, B. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Surakarta. *Jurnal akuntansi dan sistem teknologi informasi*, 16(1), 9-21.
- Saadah, L. U. (2021). Pengaruh Tingkat Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro). *EkoBis: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(1), 32–40. <https://doi.org/10.46821/ekobis.v2i1.210>
- Sakirin, S., Darwanis, D., & Abdullah, S. (2021). Do Tax Knowledge, Level of Trust, and Religiosity De-termine Compliance to Pay Property Tax?. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 4(1), 67-75.
- Senawi, A., & Osmadi, A. (2024). Property tax reassessment among local authorities: the implementation and its key challenges. *Journal of Financial Management of Property and Construction*, 29(1), 152-167.
- Siregar, B. W. S., Yulianto, K. I., Freddy, J., & Rini, P. (2023). THE EFFECT OF LOCAL TAXES ON REGIONAL ORIGINAL INCOME. *Jurnal Ekonomi*, 12(01), 1502-1509.
- Tideman, N., Blundell, V. H., FOLDVARY, P. F., GAFFNEY, P. M., & HARRISON, M. S. F. (2023). *Land and taxation*. Shephard Walwyn (Publishers) Limited.
- Yuda, S. B. (2022). Analysis of Effectiveness and Contribution of Charges For Land and Building Rights Acquisition (BPHTB) to Kediri Regional Tax Revenue 2016-2020. *Admisi dan Bisnis*, 22(3), 259-270.
- Zagoto, R., & Zalogo, E. F. (2023). Pengaruh sosialisasi pajak dan layanan Instansi terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan pedesaan. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)*, 5(1), 83-89.